



JEP

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

ISSN : 2302 – 9595
Volume 7 No 1 April 2018

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan
Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi
Di Pulau Sumatera
Hendra Prastya, Toto Gunarto, Arivina Ratih

Pengaruh Sosial Demografi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Di Industri Meubel Kota Denpasar
**Surya Dewi Rustariyuni, Luh Putu Aswitari, Nashahta Ardhiaty
Nurfiat, Kadek Nia Paramita Dewi**

Telaah Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Propinsi
Lampung : Sebuah Eksplorasi dengan Data Input-Output
Zulfa Emalia

Early Warning Indicator Krisis Nilai Tukar Pada
Perekonomian Indonesia
Anto Kurniawan, Nurbetty Herlina Sitorus

Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kota
Bandar Lampung Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi
Daerah Periode 2000-2008
Imam Awaludin

Dampak Upah Minimum Di Pasar Tenaga Kerja
Industri Pengolahan Provinsi Lampung
Ida Budiarty

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

Hendra Prastya¹, Toto Gunarto², Arivina Ratih³

Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
e-mail: study.hendra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi swasta, belanja pemerintah, dan tenaga kerja pada sektor primer terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor primer di Pulau Sumatera tahun 2010-2014. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera serta peran sektor primer di Pulau Sumatera terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel, Indeks Williamson, dan uji beda berpasangan (*Paired Sample t-test*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi swasta dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap NTB sektor primer di Pulau Sumatera tahun 2010-2014. Tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap NTB sektor primer di Pulau Sumatera tahun 2010-2014. Ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan yang menurun pada setiap tahunnya. Terdapat perbedaan ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera dengan sektor primer dan tanpa sektor primer tahun 2010-2014.

Kata Kunci: Investasi Swasta, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, NTB, Sektor Primer, Ketimpangan Pembangunan.

Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, sektor yang secara langsung memanfaatkan sumber daya alam (panen produk dari bumi) disebut sektor primer. Istilah sektor primer pertamakali dikemukakan oleh Fisher (1939) dan Clark (1940). Menurut mereka, sektor-sektor ekonomi dapat diklasifikasikan ke

dalam sektor primer (pertanian dan penggalian), sekunder (industri pengolahan) dan tersier (sektor-sektor lainnya). Teori tersebut disebut dengan "*Three sector theory*". Mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 Cetakan III sektor primer dirinci menjadi dua sektor yaitu:

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

- a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan/
Agriculture, Plantation, Livestock, Forestry and Fishery
- b. Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau besar di Indonesia dengan limpahan sumber daya alam yang besar dan tersebar pada 10 (sepuluh) wilayah provinsinya. Selama kurun waktu tahun 2010-2014 perekonomian Pulau Sumatera ditopang oleh sektor primer dengan kontribusi rata-rata terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 39,47 persen (Tabel 1). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketergantungan perekonomian Pulau Sumatera terhadap sektor ekonomi yang mengekstrak SDA secara langsung.

Kinerja sektor primer Pulau Sumatera dalam perekonomian tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah dan jenis sumber daya alam yang dimilikinya saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti investasi dan tenaga kerja. Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran (baik yang bersumber dari pemerintah dan non pemerintah) untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-

peralatan produksi dengan tujuan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2006). Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

Perbedaan kinerja sektor primer pada masing-masing daerah berpengaruh pada kemampuan tumbuh masing-masing daerah tersebut. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini juga diikuti oleh perbedaan pola pembangunan ekonomi yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi swasta, belanja pemerintah, dan tenaga kerja pada sektor primer terhadap NTB sektor primer di Pulau Sumatera tahun 2010-2014. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera serta peran sektor primer di Pulau Sumatera terhadap ketimpangan pembangunan antar

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2014.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier terhadap PDRB Pulau Sumatera Tahun 2010-2014

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1. Primer	40.30	39.72	38.79	37.98	37.25	39.47
2. Sekunder	29.71	29.86	30.24	30.67	30.91	30.08
3. Tersier	30.00	30.42	30.97	31.36	31.84	30.45
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: [BPS, 2016](#)

Kajian Pustaka

Teori Pertumbuhan Kuznet

Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideology terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 1998).

Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Teori pertumbuhan Solow-Swan telah dikategorikan sebagai teori pertumbuhan neoklasik. Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi

dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Model ini memprediksi bahwa pada akhirnya akan terjadi konvergensi dalam perekonomian menuju kondisi pertumbuhan steady-state yang bergantung hanya pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja. Dalam hal ini, kondisi steady-state menunjukkan equilibrium perekonomian jangka panjang (Mankiw, 2007).

Teori Pertumbuhan Pendekatan Keynes dan Neokeynes

Setelah terjadi depresi ekonomi dunia tahun 1929-1932, teori Smith dikoreksi oleh John Maynard Keynes (1936). Implikasi pandangan Keynes adalah untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal.

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

Teori pertumbuhan Neokeynes lebih dikenal sebagai teori Harrod-Domar yang merupakan pengembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. (Sadono Sukirno, 2006). Teori Harrod-Domar menganggap bahwa penambahan dan kesanggupan memproduksi tidak secara sendirinya akan menciptakan pertumbuhan produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh penambahan dalam kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pada masa sebelumnya (Sadono Sukirno, 2006).

Tenaga Kerja

Menurut undang-undang RI No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1991: 927) tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Menurut Artoyo (1999: 65), pengertian tenaga kerja secara umum adalah pengertian tentang potensi yang terkandung dalam diri manusia yang dikaitkan dengan pendayagunaan diberbagai kegiatan usaha yang ada. Keterlibatan pada unsur jasa atau tenaga kerja dalam hubungan kerja sehingga timbullah penyebutan tenaga kerja bagi yang menyediakan jasa tersebut, pengusaha atau yang memperkerjakan. Menurut Badan Pusat Statistik(2000: 201), dalam hal tenaga kerja menyebutkan bahwa penduduk yang masuk dalam kelompok usai kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang terbagi kedalam dua kelompok yaitu, kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Investasi

Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti atau menambah

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan, dengan perkataan lain investasi adalah kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian (Sukirno, 2000). Investasi menurut sumbernya dapat berasal dari pemerintah dan non pemerintah. Investasi pemerintah berasal dari belanja pemerintah melalui APBD, sedangkan investasi non pemerintah bersumber dari laba perusahaan swasta yang ditanam kembali, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Kredit Investasi, serta dana dana yang berasal dari masyarakat itu sendiri (Rustian Kamaludin,1991).

Ketimpangan (Disparitas) Pembangunan Antar Wilayah

Pembahasan ataupun penelitian tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pertama kali dilakukan oleh Douglas C North dengan analisis Teori Pertumbuhan Neo Klasik atau juga dikenal dengan Hipotesa Neo Klasik. Menurut hipotesa Neo Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar

wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Dengan kata lain kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (Sjafrizal, 2008).

Menurut Tambunan (2001), faktor-faktor penyebab disparitas antar daerah di Indonesia antara lain adalah :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah,
2. Alokasi investasi,
3. Tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah,
4. Perbedaan sumber daya alam (SDA),
5. Perbedaan kondisi geografis antar wilayah,
6. Perbedaan kapasitas dan kualitas infrastruktur.

Metode Penelitian

Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Pemerintah, dan Tenaga Kerja Sektor Primer di Pulau Sumatera terhadap Nilai Tambah Bruto Sektor Primer di Pulau Sumatera

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

Model Analisis

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik

tanpa perkembangan teknologi dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = f(K, L) \quad (1)$$

$$Y_t = \alpha K_t^\beta L_t^\beta \quad (2)$$

dimana:

- Y = output
- K = stok modal
- L = tenaga kerja
- = konstanta (intersep)
- = koefisien variabel bebas

Dengan K (stok modal/investasi) yang terdiri dari investasi swasta dan belanja pemerintah, maka untuk mengetahui pengaruh investasi swasta dan belanja pemerintah, dan tenaga kerja sektor primer di Pulau Sumatera terhadap NTB Pulau Sumatera digunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha PMSprim_t^{\beta_1} BPprim_t^{\beta_2} TKprim_t^{\beta_3} \quad (3)$$

Untuk melakukan estimasi terhadap persamaan (3) tersebut dilakukan dengan melogaritmakan persamaan tersebut sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\ln NTBprim_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PMSprim_{it} + \beta_2 \ln BPprim_{it} + \beta_3 \ln TKprim_{it} +$$

dimana:

- NTBprim= Nilai tambah bruto sektor primer

- PMSprim= Investasi swasta sektor primer
- BPprim = Belanja pemerintah sektor primer
- TK = Tenaga kerja sektor primer
- i = Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera
- t = Runut waktu (*time series*)
- = Konstanta (intersep)
- = Koefisien
- = *Error term*

Alat Analisis

Untuk menguji Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Pemerintah, dan Tenaga Kerja Sektor Primer di Pulau Sumatera terhadap NTB Sektor Primer di Pulau Sumatera tahun 2010-2014 digunakan metode regresi data panel dengan bantuan *Software Eviews 9 for Windows*. Terdapat tiga model estimasi yang digunakan dalam regresi data panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Sementara itu untuk mengetahui model yang akan dipilih antara *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect* digunakan tiga alat uji yaitu *F Test (Chow Test)*, *Hausman Test* dan *Langrangge Multiplier (LM) Test*.

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

Disparitas Pembangunan Antar Provinsi di Pulau Sumatera

Pengukuran disparitas pembangunan antar Provinsi di Pulau Sumatera dilakukan dengan metode Williamsons Indeks (Vw) dengan rumus (Tambunan, 2003):

$$Vw = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}} \quad (4)$$

dimana:

- Vw = Indeks Williamson
- y_i = PDRB perkapita Provinsi i
- \bar{y} = Rata-rata PDRB perkapita Pulau Sumatera
- f_i = Jumlah penduduk di Provinsi i
- n = Jumlah penduduk di Pulau Sumatera

Indeks williamson memiliki penafsiran nilai antara 0 hingga 1. Jika angka indeks mendekati angka 1 maka sangat timpang, sebaliknya jika mendekati angka 0 berarti sangat merata.

Perbedaan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Pulau Sumatera dengan Sektor Primer dan Tanpa Sektor Primer

Untuk melihat peranan sektor primer terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera, dilakukan dengan cara menghitung ketimpangan pembangunan daerah tanpa memasukkan nilai PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer dalam perhitungan tersebut (Vwnonprim), kemudian dibanding-

kan dengan besarnya tingkat ketimpangan dengan memasukkan PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer (Vwprim). Untuk melihat signifikansi perbedaan antara Vwnonprim dan Vwprim dilakukan uji beda berpasangan (*Paired Sample t-test*).

Hasil Dan Pembahasan

Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Pemerintah, dan Tenaga Kerja Sektor Primer Terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) Sektor Primer di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil pengujian terhadap pemilihan model, diperoleh model *Fixed Effects (Cross-section weights)* sebagai model terbaiknya. Hasil perhitungan model *Fixed Effects (Cross-section weights)* dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel investasi swasta sektor primer berpengaruh positif terhadap NTB sektor primer. Dengan nilai koefisien variabel investasi swasta sektor primer sebesar 0,012 maka apabila investasi swasta sektor primer meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan NTB sektor primer sebesar 0,012 persen. Variabel belanja pemerintah sektor

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

primer berpengaruh positif terhadap NTB sektor primer. bahwa apabila belanja pemerintah sektor primer meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan NTB sektor primer sebesar 0,173 persen.

Dengan nilai koefisien variabel belanja pemerintah sektor primer sebesar 0,024 maka dapat dikatakan

Tabel 2. Hasil Perhitungan Regresi Data Panel Model *Fixed Effects* (Cross-section weights)

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
- NTB sektor primer (Y)				Variabel terikat
- Investasi swasta sektor primer (X1)	0,012866	2,658380	0,0115	Tolak Ho dan terima H1
- Belanja pemerintah sektor primer (X2)	0,024351	2,013846	0,0513	Tolak Ho dan terima H1
- Tenaga kerja sektor primer (X3)	-0,392014	-3,325783	0,0020	Terima Ho dan tolak H1
- C	22,49561	14,20479	0,0000	
R-squared		= 0,997836		
Adjusted R-squared		= 0,997135		
S.E. of regression		= 0,060491		
F-statistic		= 1422,072		
Prob(F-statistic)		= 0,000000		

Sumber: Data diolah

Model persamaan regresi data panel yang diperoleh adalah:

$$\text{Ln NTB sektor primer} = 22,496 + 0,012 \text{ Ln Investasi swasta sektor primer} + 0,024 \text{ Ln Belanja pemerintah sektor primer} + (-0,392) \text{ Ln Tenaga kerja sektor primer}$$

Variabel tenaga kerja sektor primer berpengaruh negatif terhadap NTB sektor primer. Dengan nilai koefisien variabel tenaga kerja sektor primer sebesar -0,392 maka dapat dikatakan bahwa apabila tenaga kerja sektor primer meningkat sebesar 1 persen maka justru akan menurunkan NTB sektor primer sebesar -0,392 persen.

Prob (F-statistic) sebesar 0,0000, menyatakan bahwa variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. Nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,9978 berarti bahwa variasi NTB sektor primer dapat dijelaskan oleh variasi belanja pemerintah sektor

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

primer, investasi swasta sektor primer, dan tenaga kerja sektor primer sebesar 99,78 persendang sisanya 0,002 persen dijelaskan oleh faktor selain variabel tersebut.

Nilai koefisien C sebesar 22,4956 dan nilai *Cross-section Effects* masing-masing provinsi sebagaimana disajikan pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai *effctcs* negatif, sedangkan 5 provinsi lainnya bernilai positif. Nilai *effctcs* negatif berarti bahwa intersep provinsi tersebut berada dibawah rata-rata intersep Pulau Sumatera (C), begitu juga sebaliknya.

Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Indeks Williamson,

dapat diketahui bahwa nilai Indeks Williamson di Pulau Sumatera selama tahun 2010-2014 cenderung menurun. Nilai Indeks Williamson dan perkembangannya disajikan pada Tabel 4.

Perbedaan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Pulau Sumatera dengan Sektor Primer dan Tanpa Sektor Primer

Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai indeks Williamsons dengan memasukkan PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Indeks Williamsons tanpa memasukkan nilai PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer.

Tabel 3. Cross-section Effects padaMasing-masing Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi	Effect
1. ACEH	-0,08740
2. SUMUT	1,20405
3. SUMBAR	-0,24001
4. RIAU	1,69597
5. JAMBI	0,18027
6. SUMSEL	1,02922
7. BENGKULU	-1,56651
8. LAMPUNG	0,70175
9. BABEL	-1,59388
10. KEPRI	-1,32346

Sumber: Lampiran 2

Tabel 4. Nilai Indeks Williamsons Pulau Sumatera Tahun 2010-2014

*Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan
Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera*

Tahun	Indeks Williamson
2010	0,499
2011	0,491
2012	0,478
2013	0,462
2014	0,451

Sumber: Lampiran 3

Tabel 5. Nilai Indeks Williamsons Dengan Memasukkan PDRB Sektor Primer dan Tenaga Kerja Sektor Primer (Vw_{prim}) dan Nilai Indeks Williamsons Tanpa Memasukkan Nilai PDRB Sektor Primer dan Tenaga Kerja Sektor Primer ($Vwnonprim$) di Pulau Sumatera Tahun 2010-2014

Tahun	Vw_{prim}	$Vwnonprim$
2010	0,499	0,372
2011	0,491	0,386
2012	0,478	0,384
2013	0,462	0,385
2014	0,451	0,384

Sumber: Lampiran 3

Nilai Indeks Williamsons dengan memasukkan PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer dan nilai Indeks Williamsons tanpa memasukkan nilai PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer selanjutnya dibandingkan dengan uji beda berpasangan (*Paired Sample t-test*). Hasil *Paired Sample t-test* dengan bantuan software *E-Views 9 for Windows* disajikan pada Tabel 6.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-value sebesar 5,608 dan nilai Prob. sebesar 0,005 yang berarti signifikan pada taraf 95 persen ($\alpha = 5$ persen). Keputusan yang diambil pada pengujian *Paired Sample t-test* ini adalah menolak H_0 dan menerima

H_1 , terdapat perbedaan antara Indeks Williamsons dengan memasukkan PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer dan nilai Indeks Williamsons tanpa memasukkan nilai PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2010-2014.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Investasi Swasta Pada Sektor Primer Terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) Sektor Primer di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa investasi swasta pada sektor primer berpengaruh positif terhadap NTB sektor primer.

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

Apabila investasi swasta meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan NTB sektor primer sebesar 0,012 persen. Hasil tersebut mendukung penelitian yang telah

dilakukan oleh Imoughele (2014), Udoh (2011), Oloyede (2014), Lipsey (2001), Fitria (2014), Malau dkk (2015), Suratman dkk (2016), dan Sulaksono (2015).

Tabel 6. Hasil *Paired Sample t-test*

Method	Value	Probability
t-statistic	5,607834	0,0050

Sumber: Lampiran 4

Perkembangan investasi swasta sektor primer di Pulau Sumatera cenderung berfluktuasi selama kurun waktu tahun 2010-2014. Pada tahun 2010-2013 investasi swasta sektor primer di Pulau Sumatera terus meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan NTB sektor primer dalam kurun waktu yang sama, adanya peningkatan atau penurunan nilai investasi swasta sektor primer Pulau Sumatera tetap meningkatkan NTB sektor primer Pulau Sumatera pada setiap tahunnya, meskipun dengan kecenderungan melambat. Kondisi tersebut hampir terjadi pada setiap provinsi, kecuali pada Provinsi Aceh tahun 2014 dan Provinsi Riau tahun 2013-2014 dimana NTB sektor primer pada kedua provinsi tersebut mengalami penurunan (negatif). Hal

tersebut menunjukkan bahwa selain dipengaruhi oleh investasi swasta, kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan NTB sektor primer juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti belanja pemerintah, tenaga kerja, kapasitas sumber daya alam yang dimiliki (luas dan kesuburan lahan, deposit bahan tambang dan galian), teknologi yang digunakan.

Pengaruh Belanja Pemerintah Pada Sektor Primer Terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) Sektor Primer di Pulau Sumatera

Seperti halnya investasi pada sektor swasta, belanja pemerintah pada sektor primer juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap NTB sektor primer. Apabila belanja pemerintah meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan NTB sektor primer sebesar 0,024 persen. Hasil tersebut

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan World Bank (2009), Nadeem et al. (2013), Prabha et al. (2009), Fuglie (2004), Dirgantoro et al. (2009) dalam Trisnanto (2014), Armas et al. (2010), Selvaraj (1993), Chandio dkk (2016), Akintunde et al. (2013) dan Udoh (2011), Syafa'at et al. (2007), Abriningrum, et al. (2012), dan Masru'ah dkk. (2011).

Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan nilai belanja pemerintah pada sektor primer tertinggi di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2010-2014, yaitu rata-rata sebesar 34,56 persen dari total belanja pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dan yang terendah adalah Provinsi Bangka Belitung yaitu rata-rata hanya sebesar 2,63 persen. Provinsi Aceh membutuhkan intervensi belanja pemerintah yang cukup banyak dalam rangka memulihkan prasaranan dan sarana ekonomi (khususnya infrastruktur pertanian) yang rusak/hancur akibat bencana alam tsunami yang terjadi pada tahun 2004 dan gempa bumi berkekuatan 6,1 Mw pada tahun 2013 yang lalu. Perlu waktu yang panjang (lama) dan investasi yang besar untuk merehabilitasi kondisi tersebut.

Jika dibandingkan dengan NTB sektor primer dalam kurun waktu yang sama, kinerja belanja pemerintah sektor primer serupa dengan kinerja investasi swasta sektor primer. Adanya peningkatan atau penurunan nilai belanja pemerintah sektor primer Pulau Sumatera tetap meningkatkan NTB sektor primer Pulau Sumatera pada setiap tahunnya, meskipun dengan kecenderungan melambat. Kondisi tersebut hampir terjadi pada setiap provinsi, kecuali pada Provinsi Aceh tahun 2014 dan Provinsi Riau tahun 2013-2014 dimana NTB sektor primer pada kedua provinsi tersebut mengalami penurunan (negatif).

Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Primer Terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) Sektor Primer di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tenaga kerja pada sektor primer berpengaruh negatif terhadap pembentukan NTB sektor primer. Apabila tenaga kerja meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan NTB sektor primer sebesar 0,392 persen. Begitu juga sebaliknya jika terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 1 persen maka akan meningkatkan NTB sektor primer sebesar 0,392 persen. Hasil tersebut sesuai

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masru'ah(2013), Widhyana (2011), Mubaroq (2013).

Di Pulau Sumatera, terjadinya pengaruh negatif tenaga kerja sektor primer terhadap NTB sektor primer selama kurun waktu tahun 2010-2014 diduga karena adanya transformasi struktural (*structural transformation*) akibat adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*labor surplus*). Lewis (dalam Todaro, 1999) mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu fakta bahwa sebagian tenaga kerja ditarik dari sektor pertanian dan sektor tersebut tidak akan kehilangan outputnya sedikitpun.

Selama kurun waktu tahun 2010-2014 sebagian besar tenaga kerja di Pulau Sumatera bekerja pada sektor primer terutama sektor pertanian. Namun demikian, jika dilihat dari perkembangannya jumlah tenaga kerja sektor primer cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2010-2014, 50,33 persen pada tahun 2010 dan turun menjadi sebesar 45,87 persen pada tahun 2014. Sementara itu kondisi sebaliknya terjadi pada tenaga kerja sektor non primer yang cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2010-2014.

Jika dibandingkan dengan nilai NTB sektor primer di Pulau Sumatera dalam kurun tahun 2010-2014, penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor primer Pulau Sumatera tidak mengurangi atau kehilangan outputnya bahkan justru tetap meningkat meskipun dengan kecenderungan melambat. Kondisi tersebut dapat mencerminkan adanya kecenderungan peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor primer di Pulau Sumatera selama kurun waktu tersebut.

Kecenderungan peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor primer di Pulau Sumatera selama kurun tahun 2010-2014 tersebut diduga disebabkan oleh adanya penggunaan tenaga kerja berkompetensi lebih tinggi yang semakin meningkat. Sepanjang tahun 2010-2014 telah terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sektor primer dengan tingkat pendidikan Tidak/Belum Pernah Sekolah-SD, dan diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja sektor primer dengan tingkat pendidikan SMP hingga DIV/ Universitas.

Selain diduga karena adanya penggunaan tenaga kerja dengan kompetensi lebih tinggi yang

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

semakin dominan, kecenderungan peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor primer di Pulau Sumatera selama kurun tahun 2010-2014 tersebut juga diduga karena adanya peningkatan penggunaan barang modal seperti mesin sebagai substitusi tenaga kerja. Dalam bidang pertanian barang modal yang digunakan dalam proses produksi sering disebut sebagai Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian). Selama kurun waktu tahun 2010-2014 Pulau Sumatera telah mendapatkan bantuan Alsintan yang cukup banyak dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian. Pulau Sumatera mendapat alokasi bantuan Alsintan terbanyak kedua setelah Pulau Jawa, yaitu sebesar 28,49 persen (Pulau Jawa sebesar 37,28 persen). Bantuan Alsintan tersebut seperti Traktor R-2, Traktor R-4, Pompa air, Transplanter, Cultivator, dan Chopper.

Perbedaan Antar Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan nilai *Cross-section Effects* tertinggi, Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi dengan nilai

Cross-section Effects terendah. Daerah dengan *Cross-section Effects* yang tinggi (diatas rata-rata) merupakan daerah dengan kontribusi sektor primer di atas rata-rata seluruh provinsi di Pulau Sumatera dalam pembentukan NTB sektor primer Pulau Sumatera. Pada sektor pertanian, daerah dengan *Cross-section Effects* tinggi merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian yang lebih luas jika dibanding dengan total lahan pertanian di Pulau Sumatera.

Perbedaan terhadap kualitas tenaga kerja pada sektor primer juga sangat menentukan produktivitas tenaga kerja pada sektor primer. Daerah dengan *Cross-section Effects* tinggi ternyata merupakan daerah yang memiliki tenaga kerja dengan jenjang pendidikan SD kebawah (Tidak/belum pernah sekolah < SD) lebih sedikit. Persentase tenaga kerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah (Tidak/belum pernah sekolah < SD) pada Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Persentase Tenaga Kerja dengan Jenjang Pendidikan SD Kebawah (Tidak/Belum Pernah Sekolah < SD) pada Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2014

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
----------	------	------	------	------	------

*Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan
Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera*

1. Aceh	37,18	36,76	35,39	34,18	34,10
2. Sumatera Utara	36,30	35,83	34,91	32,79	33,05
3. Sumatera Barat	42,79	40,88	41,42	40,43	40,22
4. Riau	40,23	39,77	39,44	38,59	39,36
5. Jambi	48,33	49,18	47,89	43,30	45,94
6. Sumatera Selatan	50,56	50,88	49,97	47,99	48,68
7. Bengkulu	46,31	44,28	42,15	40,66	41,61
8. Lampung	51,91	48,05	47,36	45,45	45,65
9. Bangka Belitung	53,85	50,53	51,11	49,01	48,86
10. Kepulauan Riau	24,38	25,25	25,31	23,14	22,33

Sumber: [BPS](#), 2016

Tabel 8. PDRB Perkapita Pulau Sumatera menurut Provinsi Tahun 2010-2014 (Ribu Rupiah)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
1. Aceh	22,594	22,705	23,099	23,229	23,129
2. Sumatera Utara	25,503	26,711	28,037	29,343	30,482
3. Sumatera Barat	21,667	22,639	23,744	24,861	25,970
4. Riau	70,161	71,638	72,396	72,300	72,331
5. Jambi	29,305	30,857	32,418	34,012	35,876
6. Sumatera Selatan	26,041	27,158	28,578	29,657	30,611
7. Bengkulu	16,527	17,282	18,144	18,919	19,626
8. Lampung	19,789	20,739	21,795	22,773	23,649
9. Kepulauan Bangka Belitung	29,071	30,212	31,172	32,087	32,868
10. Kepulauan Riau	66,238	68,024	70,930	73,674	76,754

Sumber: [BPS](#), 2016 (data diolah)

Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2010-2014 cenderung menurun pada setiap tahunnya. Hanya Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang PDRB Perkapitanya selalu berada di atas rata-rata PDRB

Selain sumber daya alam, perbedaan kondisi demografi merupakan salah satu faktor yang

Perkapita Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2010-2014. Sementara itu Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan PDRB Perkapita yang terendah di Pulau Sumatera selama kurun waktu yang sama. Secara rinci PDRB Perkapita Pulau Sumatera menurut Provinsi Tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 8.

dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja penduduk pada

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

daerah yang bersangkutan. Sementara itu produktivitas kerja dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk usia kerja (tenaga kerja). Provinsi dengan PDRB Perkapita yang tinggi ternyata merupakan daerah yang memiliki tenaga kerja dengan jenjang pendidikan SD kebawah (Tidak/ belum pernah sekolah < SD) relatif lebih sedikit atau berada dibawah rata-rata di Pulau Sumatera.

Perbedaan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Pulau Sumatera dengan Sektor Primer dan Tanpa Sektor Primer

Berdasarkan hasil uji beda *Paired Sample t-test* diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Indeks Williamsons dengan memasukkan PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer dan nilai Indeks Williamsons tanpa memasukkan nilai PDRB sektor primer dan tenaga kerja sektor primer di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2010-2014. Ketimpangan pembangunan dengan memasukan sektor primer akan cenderung cepat

menurun jika dibandingkan dengan tanpa sektor primer (lihat Tabel 10).

Kondisi tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tambunan (2001), bahwa ketimpangan pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi (sebagai tenaga kerja) yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga akan menjadi berbeda.

Hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa investasi sektor primer, baik yang bersumber dari swasta maupun pemerintah berpengaruh positif terhadap NTB sektor primer di Pulau Sumatera. Hartono (2008) menyimpulkan bahwa nilai investasi swasta perkapita dan alokasi bantuan pembangunan daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Selain investasi, jika tidak terdapat SDM sebagai tenaga kerja yang mengelolanya, maka sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah juga tidak akan memiliki nilai tambah. Hartono (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

*Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan
Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera*

rasio angkatan kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel investasi swasta berpengaruh positif terhadap nilai tambah bruto (NTB) sektor primer di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2010-2014. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa investasi swasta memegang peranan penting dalam meningkatkan NTB sektor primer di Pulau Sumatera;
2. Variabel belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap nilai tambah bruto (NTB) sektor primer di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2010-2014. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah provinsi melalui belanja pembangunan sangat diperlukan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya sektor primer agar

- NTB sektor primer di Pulau Sumatera;
3. Variabel tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap nilai tambah bruto (NTB) sektor primer di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2010-2014. Penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor primer yang diikuti oleh peningkatan nilai NTB sektor primer yang terjadi di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2010-2014 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor primer di Pulau Sumatera selama kurun waktu tersebut;
 4. Ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan yang menurun pada setiap tahunnya. Hasil tersebut mencerminkan kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di daerahnya untuk pembangunan yang semakin merata;
 5. Terdapat perbedaan ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera dengan sektor primer dan tanpa sektor

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

primer selama kurun waktu tahun 2010-2014. Hasil tersebut menegaskan bahwa ketimpangan dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi (sebagai tenaga kerja) yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Saran

Memperhatikan hasil simpulan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah hendaknya terus berupaya meningkatkan daya saing investasi, khususnya pada sektor primer agar minat investor swasta semakin meningkat;
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera hendaknya memprioritaskan dan mengoptimalkan dukungan belanja pembangunannya terutama untuk penyediaan infrastruktur dasar

- dan pendukung, pengembangan SDM, dan R&D sektor primer;
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera hendaknya terus berupaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor primer melalui pendidikan, pelatihan, dan implementasi teknologi padat karya;
 4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta swasta harus secara bersama-sama berkomitmen dalam melaksanakan serangkaian kebijakan pembangunan ekonomi wilayah dan pengurangan ketimpangan antar wilayah yang telah ditetapkan, seperti MP3EI, RPJMN, dan RPJMD masing-masing daerah;
 5. Pemerintah harus mengoptimalkan potensi sektor primer agar dapat berperan positif dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat dan daerah, yang ditunjukkan melalui serangkaian kebijakan pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Daftar Pustaka

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

- Akintunde et al. 2013. *An Analysis of Federal Government Expenditure and Monetary Policy on Agricultural Output in Nigeria*. University of Ibadan. Nigeria.
- Alayli, Ali. 2005. *Resource Rich Countries and Weak Institutions: The Resource Curse Effect*. EEP.
- Auty, Richard. 2001. *Natural Resources, Development Models and Sustainable Development*. Oxford University Press.
- BPS. 2009. *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Chandio et al. 2016. *Impact of Government Expenditure on Agricultural Sector and Economic Growth in Pakistan*. Sichuan Agricultural University. China.
- Ding, Ning and Field, Barry C. 2004. *Natural Resource Abundance and Economic Growth*. University of Wisconsin Press.
- Fatmawati, Inma. 2015. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Model Solow dan Model Schumpeter*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gelb, Alan, and others. 1988. *Oil Windfalls: Blessing or Curse?*. Oxford University Press.
- Ghura, Dhaneshwar. 1997. *Private Investment and Endogenous Growth: Evidence From Cameroon*. International Monetary Fund. Africa.
- Gunton, Thomas. 2003. *Natural Resources and Regional Development: An Assessment of Dependency and Comparative Advantage Paradigms*. Clark University.
- Hamzah, H. 2005. *Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Pengembangan Wilayah: Kasus di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hitipeuw J. 2011. *Indonesia, The World's Second Mega Biodiversity Country*. Kompas, 16 Mei 2011.
- Hull, Katy. 2009. *Understanding the Relationship between Economic Growth, Employment and Poverty Reduction*. www.oecd.org.
- Kamaludin, Rustian. 1991. *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*. Universitas Indonesia, Jakarta.

*Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan
Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera*

- Khan, dkk. 1997. *Public And Private Investment And The Growth Process In Developing Countries*. Oxford Bulletin Of Economics And Statistics. Provinsi Kalimantan Timur, 1981-2010. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kementerian PUPR. 2017. *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018–2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan Dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pulau Sumatera*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.
- Kuznets. S., 1955. *Economic Growth and Income Inequality*. American Economic Review (Vol. 45, No. 1 (Mar., 1955)). American Economic Association.
- Masru'ah. 2013. *Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Naufal, Agus. 2010. *Peranan Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Pemerintah Aceh*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nugroho, Adi. 2012. *Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Pengeluaran Pembangunan Pemerintah, Tenaga Kerja dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di*
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FE-UI, Jakarta.
- Supriyantoro, G. 2005. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Institut Pertanian Bogor.
- Pranadji, Tri dan Hardono, Gatoet Sroe. 2015. *Dinamika Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Prasetya, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Purba, dkk. 2010. *Proposal Operasional: Analisis Dampak Investasi Pertanian Terhadap Kinerja Sektor Pertanian*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Rustiono, Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sachs, J. D. and A. M. Warner (1995). *Economic Convergence and Economic Policy*. NBER Working Paper.

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera

- Saleng, A. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press, Yogyakarta.
- Selvaraj. 1993. *Impact Of Government Expenditure On Agriculture And Performance Of Agricultural Sector In India*. J. Agric. Econs. Bangladesh.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Sukirno. 2006. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Todaro. M.P. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- White, Simon. 2005. *Enhancing private investment for development*. Southern African IDEAS. Africa
- Widnyana, I Wayan. 2011. *Pengaruh Luas Lahan Sawah, Jumlah Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produksi Padi di Kabupaten Badung Tahun 1998-2007*.

Emi Maimunah, Dede Supriyanto

*Analisis Produktivitas Individual Tenaga Kerja
Pada Usaha Sewa Mobil KPN “Serba Usaha”*